

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Noviani dan Hendarsyah, 2020), dilakukan untuk meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan parsial dan simultan studi kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Secara parsial dan simultan hasil dari penelitian ini berpengaruh signifikan antara Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar *et al.*, 2020), dilakukan untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dalam model penerimaan teknologi terhadap implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan riset deskriptif dan kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimediasi oleh keberhasilan dari implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anisa dan Ananda, 2019), dilakukan untuk menguji pengaruh ekspektasi kinerja terhadap minat dalam menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap minat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari *et al.*, 2016), dilakukan untuk menganalisis determinan penggunaan SIPKD dan pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan SKPD yang menggunakan model UTAUT modifikasi serta model Delone dan McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh rekan kerja dari faktor manusia dan pelatihan merupakan faktor yang menentukan penggunaan SIPKD sedangkan kondisi yang memfasilitasi dukungan atasan, kualitas sistem dan kualitas informasi bukan merupakan faktor yang menentukan dalam penggunaan SIPKD. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan SIPKD tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan SKPD, dengan demikian faktor yang dominan dalam menentukan penggunaan SIPKD adalah faktor manusia. Faktor manusia mendominasi karena dalam penggunaan SIPKD, manusia menunjukkan perilaku pengguna sebagai makhluk individu yang berperilaku menerima kepentingan dan sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fachri dan Mediaty, 2019), dilakukan untuk menganalisis penggunaan akuntansi keuangan daerah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suhairi, 2015), dilakukan untuk mengevaluasi sistem akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akuntansi akrual dan merancang akuntansi dengan menggunakan aplikasi excel dalam menyediakan LKPD berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan teknik purposive random sampling yang digunakan terhadap 6 kotamadya/kabupaten di Sumatera Barat yaitu Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Padang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penganggaran dan penatausahaan telah menghasilkan laporan secara efektif namun dalam penyusunan LKPD, aplikasi SIPKD masih banyak kelemahan termasuk beberapa fasilitas prosedur yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syahdi dan Bijaang, 2018), dilakukan untuk 1) menganalisis dan menjelaskan pengaruh implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Palopo, 2) menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif regresi berganda dengan menggunakan Program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini merupakan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo berjalan dengan efektif. Sedangkan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh pegawai maka pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mbaka dan Namada, 2019) dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) terhadap efektivitas rantai pasokan yang berfokus pada pemasok Pemerintah Kabupaten Kirinyaga, staff yang merupakan pengguna IFMIS dan

staff IFMIS perbendaharaan nasional Kenya. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IFMIS memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas rantai pasokan. Efektivitas IFMIS dapat ditingkatkan lagi dengan meningkatkan sistem kontrol untuk melindungi dokumen dari serangan virus atau tersedat termasuk deteksi penipuan yang lebih kuat, pelaporan dan aplikasi yang luas serta penggunaan pembelian elektronik di semua departemen daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andrian *et al.*, 2018), dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman pemerintah standar akuntansi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan mendukung hipotesis dan penerapan informasi sistem pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jaeng *et al.*, 2019), dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas kolaborasi, kualitas informasi, kualitas sistem tentang penggunaan SIPKD dan pengaruh penggunaan SIPKD pada kualitas individu. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi, kualitas informasi dan kualitas sistem memiliki efek yang positif pada penggunaan SIPKD. Penggunaan SIPKD memiliki efek positif kinerja individu.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1.1. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Taufiq (2018 : 2) Sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi adalah data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Sistem informasi adalah

kumpulan sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data hingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna.

Menurut Marakas dan O'Brien (2017 : 6) Sistem Informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya, dan kebijakan serta prosedur dalam menyimpan, mendapatkan kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia. Perangkat keras (mesin dan media), perangkat lunak (program dan prosedur), data (basis data dan basis pengetahuan), dan jaringan (media komunikasi dan dukungan jaringan) untuk melakukan aktivitas masukan, keluaran, pemrosesan, penyimpanan dan juga pengendalian yang mengubah sumber daya menjadi produk informasi.

Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen pada tingkat operasional. Perkembangan sistem informasi ini juga telah menyebabkan perubahan pada peran manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu mendapatkan perolehan informasi yang paling akurat dan terkini.

Penggunaan sistem informasi atau teknologi informasi yang semakin meningkat, khususnya internet dapat menyebabkan setiap orang melakukan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas dan tepat waktu. Penggunaan sistem informasi yang digunakan oleh institusi pemerintahan biasanya untuk menunjukkan bahwa suatu institusi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparatur itu sendiri. Kriteria dari sistem informasi yaitu fleksibel, efektif dan efisien.

2.2.1.2. Komponen Sistem Informasi

Menurut Yakub (2012 : 20) sistem informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen. Komponen sistem informasi

disebut dengan istilah blok bangunan (*building block*). Komponen sistem informasi tersebut terdiri dari :

- a. Blok masukan (*input block*), input memiliki data yang masuk kedalam sistem informasi dan juga metode-metode untuk menangkap data yang dimasukkan.
- b. Blok model (*model block*), blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data.
- c. Blok keluaran (*output block*), produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
- d. Blok teknologi (*technology block*), blok teknologi ini digunakan untuk menerima input, menyimpan, mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dari sistem secara keseluruhan.
- e. Basis data (*database block*), basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak (*software*) untuk dimanipulasinya.

2.2.1.3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi menurut TMBooks (2017 : 6) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Menurut Romney dan Steinbart (2018 : 10) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk dengan orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan.

Menurut Turner, Weickgenannt dan Copeland (2017 : 4) sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur dan sistem yang akan menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan,

meringkas dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan dalam bentuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai menghasilkan sebuah laporan data akuntansi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal.

2.2.1.4. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat enam komponen Sistem Informasi Akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2018 : 11) yaitu sebagai berikut:

1. Para pengguna yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data
5. Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferan dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan pada Sistem Informasi Akuntansi
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan untuk melindungi Sistem Informasi Akuntansi.

2.2.1.5. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbart (2018 : 11) mengatakan bahwa dari keenam komponen Sistem Informasi Akuntansi diatas memungkinkan SIA dapat memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas, sumber daya dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulan.

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya dan personil organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

2.2.1.6. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2018 : 11) SIA yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai bagi organisasi dengan :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan (jasa)
2. Meningkatkan efisiensi
3. Berbagi pengetahuan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pemasokannya (*supply chains*)
5. Memperbaiki struktur pengendalian internal
6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan

2.2.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Pemerintah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif mengenai informasi pada posisi keuangan daerah, sistem tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasar tersebut pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem yang terkait dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan juga auditabel.

Aplikasi SIPKD dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kemendagri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mengimplementasikan dan menginterpretasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut Yusup (2016 : 153) fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah seperti penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
2. Menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya
4. Menyajikan informasi yang akurat.

Aplikasi SIPKD dapat dikategorikan sebagai sistem informasi karena aplikasi ini merupakan sistem yang dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Menurut Yusup (2016 : 154) Elemen-elemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ada 2 alternatif yang dapat dipilih dalam menghasilkan laporan keuangan melalui aplikasi SIPKD, yaitu :

1. Laporan Keuangan lengkap

Laporan keuangan lengkap menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Buku jurnal SKPD
- b. Buku jurnal PPKD
- c. Buku Besar Rekening Anggaran
- d. Buku Besar Rekening Neraca
- e. Laporan Realisasi Anggaran
- f. Laporan Arus Kas
- g. Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi

2. Laporan Keuangan standar

Laporan keuangan standar menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Arus Kas
- c. Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi.

Sementara dokumen-dokumen pendukung laporan keuangannya berupa dokumen SPJ, BKU Bendahara, Buku Jurnal serta Buku Besar yang dapat dilengkapi secara manual. Penerapan SIPKD dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Keamanan data
2. Kecepatan dan ketepatan waktu
3. Ketelitian
4. Variasi laporan atau output
5. Relevansi sistem

2.2.2.1. Tujuan SIPKD

Tujuan dari penyelenggaraan aplikasi SIPKD ini yaitu merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal, menyajikan laporan keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran, dan melakukan pemantau,

pengendalian dan evaluasi dari pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah serta defisit anggaran daerah.

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi SIPKD ini maka penggunaan aplikasi SIPKD ditunjukkan untuk seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan aplikasi SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi serta pelaporan maupun pertanggungjawaban APBD.

Peran aplikasi SIPKD yaitu untuk melakukan pengelolaan hubungan pemerintah daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan di masing-masing instansi yang terkait. Dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada setiap daerah diharapkan pengimplementasian aplikasi sistem informasi dapat membantu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Sampai saat ini perkembangan aplikasi SIPKD telah ditetapkan oleh pemerintah di 171 kabupaten/kota. Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi berbasis web dimana setiap bagiannya (penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan) saling terintegrasi satu sama lain. Sistem ini terdiri dari 3 modul utama yaitu :

- a. Modul *Core*, merupakan modul inti dalam aplikasi SIPKD yang berisi proses perumusan anggaran, pelaksanaan kas dan pembukuan serta pertanggungjawaban APBD
- b. Modul *Non Core*, merupakan modul tambahan dalam aplikasi SIPKD yang berisi catatan pendapatan dan piutang, payroll dan manajemen aset daerah.
- c. Kolaborasi, merupakan modul yang lebih ditunjukkan kepada para pejabat daerah karena berisi Sistem Informasi Eksekutif.

Pemerintah Pusat menyelenggarakan penerapan aplikasi SIPKD secara nasional dengan tujuan :

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional

3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pengendalian Defisit Anggaran
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah dan defisit anggaran daerah.

Ini menunjukkan bahwa pengimplementasian aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi dalam sektor publik dapat meningkatkan kinerja yang sangat maksimal dan mengandung arti dalam terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan terhadap individu dalam perusahaan atau organisasi. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, untuk desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan pada khususnya.

Pada Surat Edaran No.SE.900/122/BAKD diamatkan 6 regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

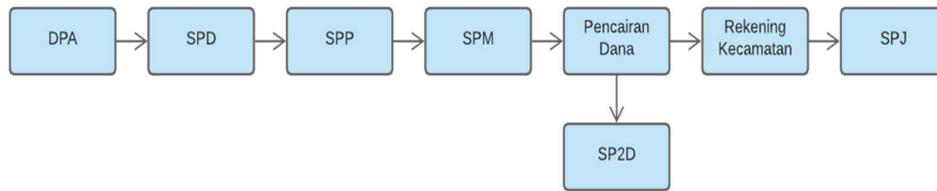
- a. Wilayah I, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;
- d. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Tengah;

- f. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.3. Alur Prosedur pada Sistem SIPKD untuk Penyusunan Laporan Keuangan

Alur prosedur pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai berikut :

1. Saat penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), anggaran DPA langsung masuk ke dalam Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Setelah memasukkan anggaran ke dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk mengajukan belanja langsung pengguna sistem SIPKD harus membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk SPP harus dibuat oleh Kepala seksi PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) sedangkan SPM harus dibuat oleh Pimpinan seperti camat, lurah atau kepala dinas
3. Dana/anggaran dialokasikan langsung setelah membuat SPP dan SPM. Pencairan dana ini berbentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jadi SP2D akan diterbitkan setelah kegiatan dilakukan dan biaya telah dibayarkan pada saat SPP dan SPM diserahkan. Setelah keluar dari SP2D, masuk kedalam rekening kecamatan untuk membayar kegiatan
4. Jika menemukan kegiatan belanja maka kecamatan akan membayarkan kegiatan itu ke penyedia menggunakan rekening kecamatan dan setelah membayar kegiatan tersebut masuklah kedalam Surat PertanggungJawaban (SPJ)
5. Saat masuk kedalam SPJ harus mengumpulkan bukti-bukti seperti kwitansi dan hasil kegiatan (seperti: daftar hadir, dokumentasi pelaksanaan kegiatan), lalu di monitoring setiap 3 bulan sekali untuk pelaksanaan kegiatannya dan per 6 bulan sekali untuk laporan keuangannya.



Gambar 2. 1. Alur Prosedur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Faud (2016 : 5) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode. Beberapa macam laporan keuangan, seperti berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Faud (2016 : 15) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang spesifik.

2.2.4.2. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Jenis-jenis laporan keuangan menurut Faud (2016 : 7) sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) - Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan (basis akurat) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) - Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh oleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja (basis akurat) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang ada dalam penganggaran pemerintah, terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e) Penerimaan anggaran, antara lain berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.

4. Laporan Kinerja dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan yang dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan lain yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain laporan keuangan pokok entitas pelaporan, pemerintah daerah diperkenankan untuk menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun laporan
- c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis kas

- f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, dan tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

2.2.4.3. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu. Menurut Mahmudi (2016 : 9) fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.2.4.4. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus terus berupaya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Menurut Mahmudi (2019 : 11) Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dapat dinilai berkualitas jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan :
 - a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*predictive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan dan kinerja di masa datang
 - b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*)
 - c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu karena nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
2. Andal (*Reliability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan yang terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan
 - c. Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan yang tidak bersifat berpihak dan kecenderungan terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis
 4. Dapat dipahami (*understandability*), artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

2.2.5. Implementasi SIPKD terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Xaverina (2014 : 21) kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terletak pada ketidakmampuan dalam menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji serta proses penatausahaan sehingga dapat menimbulkan banyak data yang tidak akurat dalam proses akuntansi yang dihasilkan oleh LKPD. Kelemahan lain pada pengelolaan keuangan daerah adalah ketidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak data penting yang hilang. Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri sangat penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyajikan LKPD yang transparan dan akuntabel. Ditjen Keuangan Daerah harus terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara demi kualitas laporan keuangan yang baik dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan juga komunikasi digital pada masyarakat, hampir semua instansi pemerintah telah memiliki halaman web tersendiri. Melalui website tersebut, instansi pemerintah dapat menyajikan

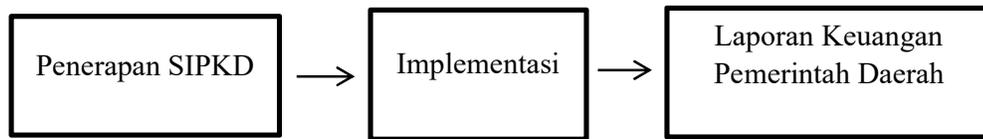
informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, struktur organisasi tata kerja, pelayanan publik dan peraturan website yang diteliti dapat mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel.

Strategi yang ditawarkan dalam hal pembaharuan teknologi ini dapat mengoptimalkan penggunaan situs website pada instansi pemerintah yang lebih transparan dan dapat digunakan langsung oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Ditjen Keuangan Kemendagri menghadirkan aplikasi SIPKD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan. Hal tersebut dapat mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam sebuah sistem aplikasi yang dapat mendukung seluruh pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah. Dengan itu, pemerintah daerah harus menyusun pedoman untuk implementasi aplikasi SIPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3. Kerangka Konseptual

Pemerintah memerlukan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara lebih komprehensif mengenai informasi dan posisi laporan keuangan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, dibuatlah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi SIPKD ini dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada dasarnya pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan daerah yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi integritas dengan sistem-sistem yang terkait sehingga akan lebih tertib dalam dokumentasi dan informasi laporan keuangannya.

Berdasarkan kerangka diatas, penulis menyusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: penulis,2021